

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

BAPPEDA adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan di daerah serta penilaian dan pelaksanaannya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibentuk berdasarkan kebutuhan, perkembangan dan kemajuan di Bidang Pemerintahan serta kemajuan teknologi dewasa ini, dalam rangka membantu pemerintah daerah melaksanakan pembangunan, khususnya di Bidang Pemerintahan.

Sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, telah memberikan wewenang dan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk merencanakan dan menetapkan sepenuhnya kebijakan dan program daerahnya. Dengan adanya otonomi daerah maka Pemerintahan daerah dituntut lebih mandiri, sehingga berbagai perintis pembangunan daerah kearah tujuan dan kesuksesan akan menjadi agenda penting yang harus disiapkan pemerintah oleh pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan dan kesuksesan tersebut maka diperlukan perencanaan untuk menetapkan tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. (Tarigan, 2004)

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Mekanisme perencanaan pembangunan, sangat diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tujuan dari perencanaan pembangunan adalah menjadikan program pembangunan tepat

dengan arah yang dituju dan tidak abu-abu. Urgensi dari perencanaan pembangunan itu adalah agar rencana dari pembangunan yang akan dijalankan tersusun dengan baik dan sistematis, sehingga dalam pelaksanaannya mudah melakukan pengontrolan.

Oleh sebab itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bertanggungjawab dalam penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tingkat daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan potensi sekaligus mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata tidak mudah, terdapat banyak masalah antara lain terkait kurangnya konsistensi perencanaan dan materi hingga permasalahan dilapangan. Disamping itu ruang gerak Pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengaturan pembangunan yang sesuai potensi dan prioritas daerah sebenarnya sangat terbatas. (Bastian, 2006)

Selain permasalahan diatas, setiap daerah pasti memiliki permasalahan spesifik yang sering kali berbeda antar daerah. Perbedaan ini pun berakibat pada perbedaan rencana pembangunan yang akan dilakukan didaerah yang bersangkutan. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah seharusnya bergantung pada permasalahan yang muncul didearah tersebut. Namun pada kenyataannya permasalahan suatu daerah sering kali tidak tercermin dalam struktur perencanaan pemerintah. (Bastian, 2006)

Mekanisme perencanaan pembangunan serta penentuan prioritas, sangat diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, maka Daerah perlu menyelenggarakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat provinsi, termasuk menyelenggarakan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah/Provinsi, Kabupaten dan Kota (Forum SKPD). Semua masukan yang diperoleh dari Musrenbang secara berjenjang ini diperlukan karena akan mempengaruhi kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pendanaan atau anggaran kegiatan di daerah.

Ciri-ciri pokok dari perencanaan umum mencakup serangkaian tindakan berurutan yang ditujukan pada pemecahan persoalan-persoalan di masa datang dan semua perencanaan mencakup suatu proses yang berurutan yang dapat di wujudkan sebagai konsep dalam sejumlah tahapan. Karena tindakannya berurutan, berarti ada tahapan yang dilalui dalam perencanaan, antara lain :

1. Identifikasi Persoalan
2. Perumusan tujuan umum dan sasaran khusus hingga target-target yang kuantitatif
3. Proyeksi keadaan di masa akan datang
4. Pencairan dan Penilaian berbagai alternatif
5. Penyusunan rencana terpilih

Oleh karena suatu perencanaan pembangunan sangat penting untuk membangun suatu daerah, sehingga membuat penulis tertarik untuk magang di

BAPPEDA sekaligus untuk mendapatkan pengalaman di berbagai bidang pada instansi ini melalui proses pembelajaran langsung dalam rangka memanfaatkan keprofesian dalam satu bidang ilmu tertentu.

Berdasarkan landasan diatas penulis tertarik untuk mengangkat masalah perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan pembangunan pada BAPPEDA Kota Padang dengan judul “**Mekanisme Perencanaan Program Pembangunan pada BAPPEDA Kota Padang tahun 2015**” Dengan harapan menguasai Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah pada BAPPEDA Kota Padang adalah :

“Bagaimana Mekanisme perencanaan pembangunan serta prioritas pembangunan Kota Padang pada BAPPEDA Kota Padang tahun 2015 ?”

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

1. Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar diploma III di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Memperkenalkan peserta magang pada dunia kerja sehingga dapat memiliki wawasan dan pengalaman.
3. Menambah keterampilan mahasiswa yang tidak dapat di bangku kuliah.
4. Sebagai salah satu usaha mempersiapkan SDM yang berkualitas dalam menghadapi persaingan di masa akan datang

1.3.2 Tujuan Khusus



Mengetahui bagaimana mekanisme penentuan perencanaan pembangunan pada BAPPEDA Kota Padang pada Tahun 2015.

1.4 Manfaat

1. Untuk mengetahui Mekanisme perencanaan pembangunan serta permasalahan yang dihadapi dalam penentuan prioritas dalam perencanaan pembangunan
2. Diharapkan dapat memberi manfaat bagi instansi yaitu BAPPEDA dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah Kota Padang.
3. Sebagai penambah ilmu pengetahuan bagi penulis tentang teori-teori yang berhubungan dengan mekanisme penentuan prioritas dan perencanaan pembangunan.
4. Dapat menjadi perbandingan antara teori dan praktek perencanaan pembangunan daerah.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Untuk memenuhi mata kuliah yang harus diikuti oleh penulis, maka penulis melaksanakan magang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang selama 40 hari kerja.

Penulis mulai melaksanakan kegiatan magang di BAPPEDA Kota Padang mulai bulan Juni 2015 sampai Juli 2015. Dalam pelaksanaan magang penulis ditempatkan pada bagian Ekonomi.

1.6 Sistematis Penulisan

Sistematis penulisan Laporan Magang ini dibagi atas lima bab yang masing-masing bab saling berhubungan satu sama lainnya.

Sistematika penulisan Laporan Magang ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Magang, Manfaat, Tempat dan Waktu magang dan Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan tentang landasan teori yang terdiri dari :

Pengertian perencanaan, pengertian pembangunan, pengertian pembangunan daerah, pengertian perencanaan pembangunan daerah, Mekanisme perencanaan, tahap-tahap proses perencanaan pembangunan, pendekatan penyusunan perencanaan pembangunan, unsur-unsur pokok perencanaan pembangunan, dasar hukum, dan mekanisme penentuan prioritas dan perencanaan pembangunan.

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini menggambarkan tentang, gambaran umum Kota Padang, gambaran umum dari BAPPEDA Provinsi Kota Padang, visi dan misi BAPPEDA Kota Padang, tugas Pokok dan fungsi BAPPEDA Kota Padang, struktur organisasi BAPPEDA Kota Padang, sarana dan prasarana serta Mekanisme penentuan prioritas dan perencanaan pembangunan BAPPEDA Kota Padang.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisikan, tentang hasil yang telah penulis dapatkan saat mengikuti kegiatan magang yang berkenaan dengan mekanisme penentuan prioritas dan perencanaan pembangunan pada BAPPEDA Kota Padang pada Tahun 2015

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan, kesimpulan dari laporan yang terkait dengan tujuan pembuatan laporan dan saran yang dapat diberikan sehingga memberikan masukan bagi instansi dan pihak-pihak yang berkepentingan di masa yang akan datang.

